BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam sistem negara pemerintah sangat dibutuhkan untuk masyarakat yaitu mengayomi serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup keduanya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

¹ Tim Visi Yustisia. 2015. *Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia. Hal 41-42

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan Pendapatan Asli Desa tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Menurut Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain Pendapatan Desa yang sah.³

Desa Pacet merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, wilayah pacet berada di lereng gunung welirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian rata – rata 600 Mdpl. Hal tersebut menempatkan Pacet sebagai salah

² Sugiman. "*Pemerintahan Desa*". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hal 83-85

³ Ahmad Juliarso. "*Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pades*". Universitas Galuh. Vol. 4 No. 2, 2017. Hal 363

satu daerah wisata yang diperhitungkan di Jawa Timur. Pacet juga dijuluki sebagai daerah wisata kolam air panas dan air terjun yang indah. Selain dijuluki sebagai daerah wisata Kecamatan Pacet juga merupakan daerah pertanian yang subur karena terletak di antara dua gunung. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Pacet bermata pencaharian sebagai Petani namun dengan banyaknya area wisata di Pacet tentunya menjadi peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjajakan aneka makanan, hasil bumi serta jasa wisata.

Dengan adanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan perekonomian maka Pemerintah Desa Pacet sudah selangkahnya bisa memanfaatkan Potensi tersebut. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya peranan Pemerintah Desa sangat vital, bagaimana upaya dari Pemerintah Desa untuk bisa menjadikan masyarakat Desa Pacet terangkat perekonomiannya dengan banyaknya potensi- potensi yang dimilikinya. Tentunya upaya memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan ketrampilan, kreatifitas serta wawasan masyarakat tentang pemanfaatan potensi-potensi yang berada di Kecamatan Pacet. Pemerintah dan masyarakat tentunya harus saling bersinergi dan mempunyai visi yang sama yaitu sama- sama ingin menjadikan daerah Pacet sebagai ladang untuk meningkatkan perekonomian kawasan Pacet serta dapat mensejahterakan masyarakat kawasan Pacet dan sekitarnya.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana inovasi tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa ?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana inovasi tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa untuk memajukan masyarakat dan pengelolaan pendapatan desa.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya tentang pendapatan asli desa.

1.5 Batasan penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada analisis perencanaan, perumusan tata kelola, inovasi tata kelola pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa .